



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL SEBAGAI KATALISATOR UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Alifah Fatikhatun Nafisyah^{1*}, Nursiwi Nugraheni²

¹² Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2024-02-19

Revised: 2024-02-21

Accepted: 2024-02-24

Kata Kunci:

Pemberdayaan Masyarakat
Kemiskinan
Ekonomi dan Sosial.

Keywords:

Community empowerment
Poverty
Economic and Social

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menguraikan peran penting pemberdayaan masyarakat lokal dalam mencapai tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai katalisator perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dengan mengumpulkan informasi dari artikel penelitian terkait, menggunakan pendekatan kualitatif untuk merinci temuan yang diperoleh. Tinjauan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal memiliki dampak signifikan dalam mempercepat pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah diidentifikasi sebagai kunci dalam proses ini. Rekomendasi yang diberikan mencakup berbagai langkah, termasuk penggunaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai modal usaha, pelaksanaan program pelatihan usaha dan pembinaan, pemberdayaan UMKM, peran aktif perempuan dalam sektor ekowisata, dan upaya pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan

efektivitas upaya pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to investigate and delineate the crucial role of empowering local communities in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) as a catalyst for change. The research method employed is documentation, gathering information from related research articles, using a qualitative approach to detail the findings obtained. The review of the research results indicates that empowering local communities has a significant impact on accelerating the achievement of SDGs, particularly in the economic and social aspects. Collaboration between communities and governments is identified as key in this process. Recommendations provided include various steps, such as utilizing Village-Owned Enterprises (BUMDes) as business capital, implementing business training and coaching programs, empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs), active involvement of women in the ecotourism sector, and efforts in cultural heritage preservation. Thus, collaborative efforts between communities and governments are expected to enhance the effectiveness of sustainable development endeavors

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa saat ini SDGs (*Sustainable Development Goals*) menjadi komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat guna mewujudkan target pembangunan di tahun 2030. Terdapat 17 tujuan yang menjadi fokus untuk pertumbuhan dunia yang seimbang. Dari beberapa tujuan tersebut terdapat salah satu tujuan yang tidak dapat diabaikan, mengingat tantangan global yang semakin kompleks dan mendesak. Tujuan tersebut ialah mengakhiri

kemiskinan dalam konteks ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang semakin meningkat (Bappenas, 2020).

Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan SDGs (Kementrian PPN/Bappenas, 2022), persentase dari pilar sosial membutuhkan perhatian khusus dimana 26% dari pilar tersebut belum menghasilkan adanya progres yang baik. Sedangkan pada pilar ekonomi terdapat 25% target yang memerlukan tindakan. Walaupun keseluruhan pilar pembangunan TPB/SDGs telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam pencapaian target di tahun 2021, namun bukan berarti seluruh target SDGs tersebut sudah tercapai. Justru hal tersebut menjadi tantangan yang perlu di tuntaskan, agar Indonesia dapat memenuhi target sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini pilar sosial dan ekonomi dapat diketahui progresnya melalui target tujuan yang pertama ialah pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengakhiri kemiskinan, sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut. Pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip dasar yang terintegrasi antara kepedulian sosial dan ekonomi dalam semua aspek pengambilan keputusan (Emas, 2020).

Peran serta masyarakat lokal sangat dibutuhkan sebagai katalisator atau pemercepat tindakan perubahan untuk mencapai tujuan tersebut. Usaha untuk memberikan dorongan kepada masyarakat dalam keikutsertaan pada pembangunan desa merupakan hal yang harus dilakukan, perlunya peranan pemerintah untuk mendorong keterlibatan tersebut (Katili & dkk., 2022). Menurut (Putri & Putri, 2022), Pembangunan Ekonomi Lokal merupakan salah satu cara sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terkhusus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Selain itu pelaksanaan LED (*local economic development*) yang tepat juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan masyarakat lokal dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak agar dapat menekan tingkat kemiskin. Untuk mencapai target tujuan tersebut tentu memerlukan kerja sama antar individu, perusahaan, dan pemerintah (Capah et al., 2023).

Beberapa tindakan telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti untuk mengetahui fakta di lapangan, hal tersebut terbukti bahwa adanya dampak positif pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat miskin sehingga mengalami peningkatan (Latifah et al., 2022). Selain itu, peran perempuan pada masyarakat lokal yang ikut serta melestarikan lingkungan setempat juga memberikan dampak baik terhadap perkembangan ekowisata yang juga dapat mencapai kesetaraan gender hingga berdampak pula bagi pendapatan ekonomi (Ariani & Juraida, 2019). Dari beberapa fakta tersebut adanya ketidaksetaraan sosial ekonomi juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat, kondisi tersebut berakibat pada lemahnya kualitas keadilan sehingga mengakibatkan rentannya masyarakat terkait beberapa masalah baik yang bersifat sosial maupun ekonomi (Muchaqqi & dkk., 2019). Dengan demikian, perlu

adanya pengembangan desa untuk mendukung pencapaian SDGs yang harus sesegera mungkin dilakukan (Iskandar, 2020).

Meskipun keterlibatan masyarakat berpacu pada kegiatan sosial ekonomi, namun berdasarkan 17 tujuan yang tertulis masing-masing pilar berhubungan satu sama lain. Sehingga untuk mencapai salah satu tujuan tertentu perlu adanya dorongan atau tindakan dari aspek yang berkaitan. Berdasarkan analisis fakta yang terjadi di lapangan, kondisi saat ini menggambarkan adanya banyak peluang untuk mengikutsertakan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan sosial ekonomi untuk mempercepat terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, dibalik itu masih lemahnya kualitas keadilan karena adanya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Kesenjangan tersebut tentunya perlu adanya tindakan agar masyarakat dapat hidup bersama secara aman dan damai.

Beberapa peneliti fokus pada dampak dan upaya terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan, sedangkan penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai katalisator masih terbatas. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran peran masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan mengakhiri kemiskinan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini ialah untuk menyelidiki dan menggambarkan peran krusial pemberdayaan masyarakat lokal dalam mewujudkan tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya adalah untuk memahami pengalaman langsung dan pandangan masyarakat yang terlibat dalam inisiatif pemberdayaan di berbagai konteks lokal. Penelitian ini mengeksplorasi kasus-kasus spesifik dari berbagai wilayah yang terkait dengan pembangunan sosial ekonomi lokal. Penelitian dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat lokal dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibahas kali ini ialah pengentasan kemiskinan. Dimana kemiskinan sendiri dalam buku Metadata Pilar Sosial Edisi II, diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan sebagai modal hidup layak. Namun definisi kemiskinan itu sendiri sulit ditentukan, karena kemiskinan memiliki sifat yang bermakna multi dimensi atau mengandung banyak arti. Dengan demikian dalam hal ini pemerintah menyepakati bahwa untuk mengukur kemiskinan dilihat dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang.

Pada perolehan hasil penelitian disajikan tinjauan terkait pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pemercepat realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan

yang bersumber dari beberapa penelitian yang terkait yang dilaksanakan dari berbagai aspek, diantaranya yaitu terkait dengan kontribusi pemberdayaan masyarakat lokal terhadap pencapaian SDGs dan memperlihatkan bahwa pendekatan pemberdayaan bukan hanya solusi efektif tetapi juga mendalam secara kontekstual.

Kemiskinan merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentas masalah tersebut namun strategi yang dirasa paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan masyarakat miskin (Ras, 2013). Beberapa upaya lain yang telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan menurut (Ubur, 2011) ialah: 1) JPS beras; 2) Program Pengembangan Kecamatan; 3) Program Inpres Desa Tertinggal; 4) Program Air Bersih; 5) Program Kesehatan (Poliklinik); 6) Program Penghijauan; 7) Program Bantuan Dinas Peternakan; 8) Kredit Usaha Tani; 9) JPS Kesehatan; 10) Usaha Ekonomi Simpan-pinjam Desa (UESD). Sedangkan menurut (Putra, 2021), strategi pengentasan kemiskinan kontekstual Indonesia berdasarkan aspek individu yang dapat dilakukan kepada kepala keluarga yaitu diberikan kesempatan untuk berwirausaha, sedangkan kepala keluarga yang belum tamat sekolah dasar atau masih memiliki riwayat sekolah yang masih rendah dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya. Menurut temuan dari (Murdiyana & Mulyana, 2017), terdapat 4 strategi yang diterapkan oleh pemerintah diantaranya yaitu: 1) Memperbaiki Program Perlindungan Sosial; 2) Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar; 3) Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin; 4) Pembangunan Inklusif.

Beberapa strategi yang telah dilaksanakan telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keterlaksanaannya tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari beberapa strategi dan upaya tersebut diperoleh berbagai penerapan pemberdayaan masyarakat sebagai katalisator pada pengentasan kemiskinan yang lebih fokus pada beberapa poin yang telah disebutkan, berikut perolehan hasil analisis yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian (Natalia & Maulidya, 2023), telah dilakukan aktualisasi 4 pilar SDGs secara bertahap di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan diantaranya yaitu Pilar Pembangunan Sosial yang di terapkan melalui bantuan sosial maupun pelayanan kesehatan, yang kedua Pilar Ekonomi yaitu berupa bantuan pinjaman dana oleh BUMDes sebagai modal usaha, yang ketiga Pilar Lingkungan berupa kegiatan pengelolaan sampah kepada masyarakat sekitar dan pemanfaatan lahan untuk apotek hidup, selanjutnya Pilar hukum dan tata Kelola yang di realisasikan dengan adanya kerjasama antara perguruan tinggi dan kepolisian, guna membangun masyarakat sadar hukum. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal untuk mempercepat terwujudnya pilar-pilar terkait sangat dimanfaatkan dengan baik. dengan adanya bantuan dari pemerintah desa tentunya masyarakat sekitar dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka usaha baru.

Keterkaitan penemuan sebelumnya yang mana masyarakat diberikan fasilitas yang cukup memadai, namun pada daerah lain beberapa masyarakat masih belum dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah desa. Seperti hasil penelitian oleh (Kurniawan & Artisa, 2023), diketahui bahwa tingkat respon partisipasi masyarakat di Desa Ciburial cukup tanggap terhadap kegiatan/program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Namun ternyata persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa belum dapat berjalan maksimal, mengingat kurangnya partisipasi masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan pemerintah Desa, pada kegiatan pendataan SDGs Desa memperoleh partisipasi masyarakat sebagai relawan walaupun hasilnya belum maksimal, informasi tersebut kemudian diolah dalam hasil penelitian melalui analisis SWOT sebagai bahan perumusan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui strategi TOWS. Dari yang didapat ialah adanya peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan SDGs Desa yang dilakukan melalui penyebaran informasi terkait SDGs Desa.

Selain dari pada itu, peran serta perempuan untuk mendukung UMKM di Indonesia juga perlu di apresiasi dan kerjasama dari berbagai pihak terkait dan diharapkan adanya pemberdayaan terhadap perempuan. Dengan penyetaraan gender yang sudah memiliki perubahan pandangan pada budaya lokal di Indonesia telah memberikan inspirasi baru pada kaum wanita untuk menekuni usaha yang mereka miliki. Dibuktikan adanya peranan wanita di Indonesia yang telah berkontribusi terhadap peningkatan pada kesejahteraan ekonomi keluarga sebagai pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk mewujudkan pengembangan sumberdaya Wanita atau pelaku UMKM di Indonesia, perlunya wadah yang dapat menaungi kaum perempuan yang bekerja untuk dapat berperan lebih pada bidang usaha mereka (Marthalina, 2018). Selain dalam segi ekonomi, dalam (Nur, 2017) menyatakan bahwa, pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan pemahaman lingkungan adalah suatu yang harus memperoleh perhatian dari berbagai pihak. Agar sumberdaya manusia di Indonesia dapat berkualitas dan berdaya guna tinggi untuk pembangunan yang ramah lingkungan, maka dari itu pentingnya memberdayakan perempuan terkhusus pada bidang pendidikan lingkungan hidup.

Membentuk jiwa wirausaha memang tidak mudah, namun hal yang dapat dilakukan untuk membentuk jiwa tersebut ialah dimulai saat masih berada di sekolah (Yuniarsih, 2019). UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) merupakan alat pemercepat perekonomian Indonesia yang perlu dikembangkan dan di berdayakan melalui berbagai program penguatan untuk daya saing UMKM dalam mengatasi persaingan pasar bebas (Syaiful, 2016). Sejauh ini kendala yang masih sering ditemui menurut (Suyadi & dkk, 2018), ialah kurangnya pemerataan pembinaan yang dilaksanakan instansi terkait pada pelaku UMKM, selain itu pada umumnya pelaku UMKM kurang berani dalam mengambil resiko yang berhubungan dengan modal,

inovasi produk dan teknologi. Karena waktu yang efektif untuk pelaksanaan pelatihan usaha dan pembinaan ialah kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan dengan pembelajaran teori dan praktik (Padillah & dkk, 2019).

Selain dari pada UMKM opsi lain yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan ialah dengan pengelolaan wisata di daerah setempat. Tanggung jawab pelestarian warisan budaya merupakan tugas seluruh masyarakat bukan hanya orang-orang yang berada di daerah tersebut saja namun seluruh masyarakat yang mendatanginya, karena gambaran suatu bangsa dapat dilihat dari kebudayaan dan kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa tersebut (Brata & dkk., 2020). Tidak hanya laki-laki yang berkewajiban mengelola dan menjaga tempat wisata, perempuan juga memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang ekowisata. Keterlibatan perempuan juga menjadi salah satu target SDGs untuk mencapai tujuannya. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam keterlibatannya juga sangat beragam, mulai dari layanan akomodasi, pembuatan dan pengolahan makanan khas, pembukaan rumah makan, toko, hingga pembuatan kerajinan tangan (Ariani & Juraida, 2019).

Cara meningkatkan pelaksanaan capaian penanggulangan kemiskinan juga memerlukan adanya pembentukan struktur kelembagaan pada tingkat desa ataupun kelurahan yang disebut dengan Puskesmas (Pusat Kesehatan Sosial), sebagai salah satu wadah yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk kegiatan pelayanan sosial bersama antara masyarakat yang terdapat dalam komunitas desa dengan cara sinergis dan terpadu. Sebagai cara untuk mempermudah masyarakat miskin dan rentan yang berada di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi kebutuhan yang dihubungkan dengan program dan pelayanan yang diatur oleh pemerintah desa/kelurahan (Setiawan, 2017). Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Menurut (Ishartono & Raharjo, 2016), kebijakan penghapusan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah harus memperoleh dukungan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat, pemerintah berharap masyarakat dapat berdikari dan tidak lagi ketergantungan pada pemerintah (Riyanta & Kurniati, 2018).

4. Simpulan

Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai katalisator dalam mengakhiri kemiskinan memiliki peran yang sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan, terutama oleh perempuan, merupakan faktor penting dalam mempercepat pencapaian SDGs. Meskipun terdapat berbagai peluang untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi, namun ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perhatian khusus dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat pemberdayaan

masyarakat lokal, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang mendukung bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

References

- Ariani, D., & Juraida, I. (2019). *Eksistensi Perempuan Suku Sasak dalam Pembangunan Berkelanjutan*. 5(2), 106–115.
- Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Brata, I. B., & dkk. (2020). *Pelestarian Warisan Budaya Dalam Pembangunan Pariwisata Bali Yang Berkelanjutan. Peranan Perempuan/Ibu Dalam Pemberdayaan Remaja Dimasa Pandemi COVID-19*. Universitas Mahasaraswati Press.
- Capah, B. M., Rachim, H. A., & Raharjo, S. (2023). Implementasi Sdg's-12 Melalui Pengembangan Komunitas. *Share Social Work Journal*, 13(1), 150–161.
- Emas, R. (2020). The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining. <http://www.Reserachgate.Net/Publication/339003550> .
- Ishartono, & Raharjo, S. (2016). Sustainable Development Goals (Sdgs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*, 6(2), 154–272.
- Iskandar, A. (2020). SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Katili, M. R., & dkk. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Lokal. *Sibermas*, 466–477.
- Kementrian PPN/Bappenas. (2022). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tpb/Sdgs Tahun 2021*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniawan, M. R., & Artisa, R. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Balitbangda*, 11(1), 61–86.
- Latifah, H., Wibowo, A., & Widiyanto. (2022). *Dampak Implementasi Program Sustainable Development*. 1–9.
- Marthalina. (2018). Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *J-3P*, 3(1), 59–76.
- Muchaqqi, A., & dkk. (2019). Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi Terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 5(2), 245–274.
- Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 73–96.

- Natalia, A., & Maulidya, E. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 22–41.
- Nur, S. (2017). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *ANNISA'*, 10(1), 99–111.
- Padillah, I., & dkk. (2019). Analisis Program Pelatihan Keterampilan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(2).
- Putra, M. T. (2021). Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya. *AntMan*.
- Putri, M. H., & Putri, N. (2022). Local Economic Development sebagai Upaya Terwujudnya. *Convergence*, 4(1), 41–53.
- Ras, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *SOCIUS*, XIV.
- Riyanta, S., & Kurniati, P. (2018). Strategi Tata Kelola Kolaboratif Antara Aktor Pemerintah Dan Non Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2), 24–38.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3).
- Suyadi, & dkk. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1–10.
- Syaiful. (2016). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing. *AkMen*, 13(3), 629–636.
- Ubur, H. (2011). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur). *Aspirasi*, 2(2).
- Yuniarsih, Y. (2019). Pendidikan Pelatihan Keterampilan Kerja Kewiraswastaan di SMK Melalui Training Class Motivation. *Kompetensi*, 12(1).